hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia



Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. TEORI DASAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk memperoleh dana perusahaan dan meminimalisir biaya-biaya perusahaan serta upaya untuk mengelola keuangan suatu badan usaha atau organisasi agar dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan (Lestari & Fauzan 2023).

Manajemen berhubungan dengan tugas seorang manajer keuangan di dalam sebuah perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai aspek keuangan perusahaan, baik yang besar maupun kecil, pribadi maupun publik, menguntungkan atau tidak, serta melaksanakan berbagai kegiatan seperti perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, pengaturan kredit, analisis investasi, dan upaya untuk memperoleh dana (Fauzan dan Rusdiyanti 2022).

Berdasarkan pendapat Bambang Riyanto yang dikutip dalam Hasan et al. (2022), manajemen keuangan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi terkait dengan upaya mendapatkan sumber dana yang dibutuhkan dengan biaya yang serendah mungkin dan dengan ketentuan yang paling menguntungkan, serta usaha untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal. Menurut James Van Horne dalam Hasan et al., (2022) Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



perolehan, pendanaan serta pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh.

Kata "to manage" berarti "mengatur". Jadi, pertanyaan yang muncul adalah

apa yang diatur, mengapa diatur, siapa yang melakukannya, bagaimana

melakukannya, dan di mana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen.

Oleh karena itu. manajemen terkait dengan proses perencanaan.

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Semua proses ini

mencakup upaya anggota organisasi untuk mengarahkan sumber daya yang

dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam manajemen keuangan ada beberapa fungsi manajemen keuangan

adalah sebagai berikut:

a. *Planning*

Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan/organisasi sangat lah

penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi

laba, merencanakan arus kas

b. Budgeting

Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan

perusahaan/organisasi. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan

memaksimalkan anggaran yang ada.

c. Controlling

Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan

yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem

keuangan perusahaan/organisasi.

l. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



d. Auditing

Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan seusai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan/organisasi.

e. Reporting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reporting melaporkan keuangan, melaporkan adalah keuangan perusahaan/organisasi harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan kepada khalayak ramai.

2. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi dalam Djauhar dan Nurlela (2022), kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh suatu lembaga, baik lembaga tersebut berfokus pada manfaat atau tidak, dan hasil tersebut tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kinerja mencerminkan tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu tindakan, program, atau strategi dalam mengerti tujuan, misi, dan visi suatu kelompok yang tercantum dalam makna pengaturan mendasar suatu organisasi.

Menurut Wiratna Sujarweni dalam Eva (2019), kinerja diungkapkan sebagai hasil dari evaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan, serta perbandingan hasil kerja dengan kriteria yang telah disepakati. Setiap pekerjaan yang telah selesai perlu dievaluasi atau diukur secara teratur. Mengukur kinerja keuangan juga berarti membandingkan standar yang ditetapkan (misalnya,



menurut Peraturan Menteri Keuangan) dengan kinerja keuangan perusahaan yang ada. Kinerja keuangan diukur secara kuantitatif berdasarkan laporan keuangan tahunan.

Menurut Fahmi (2012) yang dikutip dalam Fauzan dan Rusdiyanti (2022), kinerja keuangan diartikan sebagai analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan keuangan secara tepat dan benar. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang mematuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principles).

Dari penjelasan dan definisi yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan adalah proses yang sistematis untuk menghitung, menjelaskan, dan menilai hasil kerja yang diperoleh oleh suatu lembaga dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk menilai seberapa efisien dan efektif pengelolaan keuangan yang dilakukan, serta memberikan landasan yang solid dalam pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang. Manfaat dari evaluasi kinerja meliputi:

- Untuk menilai hasil kinerja yang dicapai oleh seluruh organisasi dalam periode tertentu, evaluasi ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan aktivitas yang dilakukan.
- b. Untuk menilai kontribusi setiap departemen terhadap keseluruhan perusahaan.

- Sebagai landasan dalam merumuskan strategi perusahaan/organisasi di masa mendatang.
- d. Sebagai panduan dalam pengambilan keputusan secara umum dan untuk kegiatan organisasi, terutama terkait dengan berbagai departemen.
- e. Sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan investasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditentukan perusahaan sudah tercapai dengan baik, sehingga kepentingan para investor, kreditor, dan pemegang saham terpenuhi. Oleh karena itu, proses analisis mencakup langkah-langkah berikut:

a. Tinjauan data laporan

Kegiatan yang melibatkan penyesuaian data laporan keuangan sehubungan dengan berbagai faktor, baik jenis entitas laporan maupun sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran berpengaruh pada total yang tercatat, baik dari pendapatan maupun laba perusahaan.

b. Penghitungan

Penghitungan dilakukan dengan berbagai teknik dan metode analisis, seperti metode perbandingan, analisis persentase per elemen, dan analisis rasio keuangan. Pemilihan metode penghitungan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin dicapai.

c. Perbandingan atau pengukuran

Setelah proses penghitungan, langkah selanjutnya adalah perbandingan atau

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang



pengukuran. Langkah ini penting untuk menentukan apakah hasil penghitungan berada pada kategori sangat baik, baik, cukup, buruk, dan seterusnya.

d. Mengartikan

Proses interpretasi merupakan bagian esensial dari analisis, yang menggabungkan hasil pengukuran dengan prinsip-prinsip teori yang berlaku. Hasil dari interpretasi ini mencerminkan keberhasilan serta masalah yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan keuangannya.

e. Solusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tahap terakhir dalam proses analisis adalah menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Dengan memahami masalah keuangan yang dihadapi, perusahaan dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan situasi yang ada.

3. Analisis Laporan Keuangan Daerah

Untuk memahami pengertian dari analisis laporan keuangan, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna dari masing-masing istilah, yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis merupakan suatu proses untuk menguraikan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan lebih mendalam. Sementara itu, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, laporan laba rugi, serta arus kas suatu entitas. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai proses penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil, serta mengkaji hubungan yang signifikan antara data



kuantitatif maupun nonkuantitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan suatu entitas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. (Jaya et al., 2023).

Perubahan data yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari seni dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap konteks keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk laporan atas kemajuan perusahaan atau instansi, yang penyajiannya dilakukan secara periodik. Laporan ini dibutuhkan oleh manajemen untuk menilai perkembangan investasi, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, serta menentukan arah kebijakan keuangan di masa mendatang. Pada dasarnya, laporan keuangan memuat seluruh fakta yang telah dicatat berdasarkan transaksi, disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan tidak terlepas dari pertimbangan profesional pihak penyusun. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya pada pengelolaan keuangan desa, analisis kinerja keuangan memiliki peran penting dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), mampu mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil dari analisis kinerja keuangan daerah dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



Penggunaan untuk

keputusan strategis yang lebih tepat, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Analisis terhadap laporan keuangan ini penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah dalam (Kartoprawiro & Susanto, 2018),

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. dalam (Wawolangi et al., 2024),

Pernyataan Komponen yang melengkapi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan SAK, 2007 dalam (Jaya et al., 2023), terdiri dari:

- a. Neraca, merupakan laporan yang sistematis mengenai modal, aktiva dan hutang dari sebuah perusahaan pada saat tertentu.
- b. Laporan laba rugi, merupakan laporan yang memperlihatkan seluruh biaya dan hasil usaha dalam satu periode akuntansi.
- c. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang memperlihatkan seluruh penyebab perubahan ekuitas mulai dari jumlah pada awal periode sampai dengan jumlah ekuitas pada akhir periode.

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



Penggunaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Laporan arus kas, merupakan laporan yang memperlihatkan aliran masuk dan keluar dari arus kas yang kemudian dibebankan menjadi arus kas pendanaan, arus kas operasi dan arus kas investasi.
- e. Catatan atas laporan keuangan, merupakan seluruh laporan keuangan dengan tujuan umum. Dengan adanya laporan keuangan, maka dapat dibuat laporan-laporan lebih rinci dengan tujuan khusus, sebagai contoh untuk kantor pajak, Bank dan lain-lain.

Pembuatan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Analisis tersebut dilakukan dengan mengukur arah perkembangan dari perubahan yang terjadi pada hubungan antara unsur-unsur dari laporan keuangan setiap tahun. Berikut ini adalah tujuan yang bisa didapatkan oleh para pemakai analisis laporan keuangan (Jaya et al., 2023):

- a. Dapat mengetahui hubungan antar perusahaan dan mengambil tindakan terhadap kelemahan laporan keuangan dari perusahaan tersebut.
- b. Dapat dijadikan sebagai dasar oleh pemegang wewenang dalam pengambilan keputusan disertai dengan pertimbangan lainnya.
- c. Dapat memperkirakan laporan keuangan dimasa yang akan datang digabung dengan anggaran kas.
- d. Dapat mengetahui kondisi sekarang dan perkembangan dari laporan keuangan agar dapat memperkirakan kecenderungan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.



Ada dua metode analisis laporan keuangan yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal adalah teknik analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan dengan membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total aset atau pendapatan dalam laporan yang sama. Analisis vertikal dapat membantu dalam mengidentifikasi tren dalam kinerja perusahaan dan dapat membantu dalam menentukan area yang memerlukan perbaikan (Purwasih & Munandar 2023),

b. Analisis Horizontal (Dinamis)

horizontal terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan Analisis membandingkan data keuangan dari dua periode atau lebih untuk mengetahui tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan nominal maupun persentase dari setiap pos laporan keuangan, sehingga memudahkan dalam menilai pertumbuhan atau penurunan kinerja keuangan suatu entitas. (Arsyikirani et al. 2024),

4. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk desa dan pendistribusiannya menggunakan transfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan 1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Penggunaan untuk

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan (Putri et al., 2024).

Dalam pengelolaan berbagai kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung penyampaian serta keterbukaan informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). (Putri et al., 2024)

Alokasi dana desa adalah pertimbangan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan berasal dari pendanaan dari pemerintah pusat sehubung dengan penguatan masyarakat. Sebagai hasil dari otonomi desa, anggaran juga dialokasikan untuk pengelolaan daerah, yang disebut dana desa. Alokasi dana desa adalah dana yang disediakan pemerinah kabupaten untuk desa, yang berasaal dari sebagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Dana kompensasi adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menutupi kebutuhan daerah sebgai bagian dari pelaksaan desentralisasi. (Putri et al., 2024)

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia



secara keseluruhan agar laporan keuangan jadi signifikan sehingga dapat dilakukan dan dipahami oleh pertemuan yang berbeda, maka penting untuk melakukan analisis laporan keuangan, bahwa untuk pihak pemilik dan manajemen, alasan mendasar untuk analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara

Menurut Kasmir dalam Djauhar & Nurlela, (2022) mengemukakan bahwa

Menurut permendagri No. 114 tahun 2014 alokasi dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:

mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah

a. Penyelenggaraan pemerintah desa

direncanakan sebelumnya atau tidak.

- 1) Penetapan dan penegasan batas desa
- 2) Pendataan desa
- 3) Penyusunan tata ruang desa
- 4) Penyelenggaraan musyawarah desa
- 5) Pengelolaan informasi desa
- 6) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
- 7) Penyelenggaraan kerja sama antar desa
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana kanto desa
- 9) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- b. Pelaksanaa pembangunan desa



Penggunaan untuk kepentingan akademik

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

- 1) Pembangunan pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur, dan lingkungan desa antara lain:
 - Tamabatan Perahu
 - Jalan pemukiman b)
 - Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
 - Pembangkit listriktenaga mikrohidra
 - Lingkungan pemukiman masyarakat desa
 - Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) Air bersih berskala desa
 - Sanitasi lingkungan
 - Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 - Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- 3) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharraan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - Taman bacaan masyarakat
 - Pendidikan anak usia dini
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat c)
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

l. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4) Alokasi dana desa harus dicatat dalam APBD melalui proses pengganggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Alokasi dana desa diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

- a) Meningkatkan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b) Memperkuat kapasitas lembaga masyarakat desa untuk merencanankan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif, tergantung pada potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan penapatan dari kesempatan kerja dan usaha dimasyarkat pedesaan
- d) Mempromosikan kerjasama swadaya masyarakat yang lebih baik
 Pemerintah mengharapkan bahwa kebijakan mengenai alokasi dana
 desa dapat mendukung pembangunan partisipatif yang berorientasi pada
 masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat komunitas di pedesaan
 sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.
 Pengelolaan keuangan untuk alokasi dana desa merupakan aspek vital
 yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua aktivitas yang dibiayai
 oleh dana desa direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara
 transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Setiap
 kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,
 teknis, dan hukum (Eva, 2019).

peraturan yang berlaku di Indonesia



Keuangan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dianggap sebagai hak dan kewajiban bagi seluruh desa, serta dapat diukur dari sisi moneter. Segala aspek berupa uang dan aset yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut mampu menciptakan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip dalam pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin dalam anggaran (Eva, 2019).

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 yang dikutip oleh Husein dan Warandi (2020), pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa.

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah desa untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No.113 Tahun 2014). Dokumen perencanaan keuangan desa memuat RPJM desa dan RKP desa berdasarkan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Perundingan desa akan berlangsung paling

pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia



peraturan yang berlaku di Indonesia

. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengar

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

lambat juni setiap tahunnya. Penyusunan RPJM desa dan RKP desa dilakukan secara partisipastif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan partisipasi badan permusyawaratan desa BPD dan unsur masyarakat desa.

a. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Untuk mendukung keterbukaan desa (pemerintah desa). penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari alokasi dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) Eva (2019). Pelaksanaan anggaran desa yang sebelumnya dipergunakan pada tahun ini menghasilkan transaksi pendapatan dan belanja desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa akan diproses melalui rekening kas desa. Jika desa tersebut belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka kebijakan akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

∪niversitas Islam Indragiri

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

Semua pemasukkan dan pengeluaran di desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah.

b. Penatausahaan

Pengelolaan adalah pemasukkan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mengangkat bendahara desa, yang memutuskan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan dalam rangka pelaksanaan akuntansi desa harus diangkat berdasarkan APBD. Bendahara desa wajib melaksanakan laporan. Laporan tahunan akan disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan. Pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan baik tunai maupun kredit untuk mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penetoran dan penarikan, serta untuk mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4) Pelaporan

Ada dua tingkat pelaporan untuk pelaporan kegiatan anggaran desa. Pertama, laporan berkala. laporan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, yang dibuat secara berkala setiap semester atau setiap enam bulan, tergantung pada tingkat pembayaran dan pertanggungjawaban, termasuk realisasi pendapatan dan biaya alokasi dana desa. Kedua, laporan akhir penggunaan alokasi dana desa berisi implementasi dan alokasi dana desa, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.

5) Pertanggung jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati dan ada juga yang disampaikan ke badan permusyawaratan desa (BPD). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa sebagaimana dimaksud disertai dengan Laporan keuangan Dana Desa, terdiri atas:

- a) Laporan realisasi APBDesa
- b) Catatan atas laporan keuangan
- c) Laporan realisasi kegiatan

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

5. Rasio Keuangan Daerah

Metode penilaian kinerja suatu organisasi melibatkan pemeriksaan dan penghitungan rasio keuangan yang relevan dengan organisasi tersebut. Rasio keuangan membutuhkan perbandingan antara data dalam laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi numerik dalam neraca atau laporan laba rugi sebuah organisasi. Rasio keuangan merupakan metode yang menggunakan perbandingan data dalam laporan keuangan. Perbandingan ini dapat meliputi berbagai elemen yang ada dalam laporan keuangan yang sama atau antara laporan keuangan dengan elemen-elemen lain dalam laporan yang serupa. Rasio keuangan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai informasi numerik dalam neraca atau laporan laba rugi suatu organisasi. Rasio keuangan mengacu pada angka-angka yang dihasilkan setelah membandingkan akun dalam laporan keuangan dengan akun lain yang dianggap penting dan substansial Hidayati et al., (2023).

Menurut Hery dalam Eva (2019), analisis rasio adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling umum dan sering digunakan. Meskipun penghitungan rasio tergolong operasi aritmetika sederhana, pemahaman hasilnya tidaklah mudah. Sujarweni dalam Eva (2019) menyatakan bahwa teknik analisis ini dapat digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan positif atau negatif dari kondisi keuangan perusahaan. Tujuan melakukan analisis

hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia



indikator keuangan adalah membantu perusahaan dalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial, menilai kinerja laporan keuangannya, dan memastikan bahwa semua sumber daya yang ada berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Selain itu, laporan keuangan tahunan yang berkualitas memberikan informasi mengenai posisi aset dan pendapatan yang lalu serta saat ini, dan dapat memprediksi posisi aset dan pendapatan di masa mendatang.

Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan:

- a. Perbandingan internal (perbandingan internal). Bandingkan hubungan saat ini dengan hubungan masa lalu dan masa depan dari perusahaan yang sama.
- b. Perbandingan eksternal (perbandingan pihak ketiga) lahir pada tahun dan sumber tokoh kunci industri, yaitu perbandingan tokoh kunci perusahaan dengan perusahaan sejenis atau sekaligus dengan rata-rata industri.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan daerah. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah antara lain:

a. Rasio Efesiensi

Menurut Widodo dalam Listari et al.,(2022) menggatakan efisiensi pengelolaan anggaran daerah adalah rasio yang menunjukkan seberapa penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



besar efisiensi dari suatu pelaksanan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input . rasio efisensi yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk Rasio Efisiensi = benerimaan yang diterima.

 $\frac{\textit{Realisasi Belanja}}{\textit{Anngaran belanja}} \times 100\%$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. semakin kecil rasio efisiensi. Berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. dengan rumus sebagai berikut:

b. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkana melalui besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat/provinsi maupun dari pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (pemerintah pusat/provinsi). Semakin tinggi rasio kemanadirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD. (Susanto, 2019)

Menurut rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah Rasio Kemandirian= Alokasi Dana Desa (ADD) X 100% hsi serta pinjaman Bantuan Pusat

daerah. Dengan rumus sebagai berikut:

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktifitas yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk balanj rutin berarti persentase investasi(belanja pembangunan) digunakan belanja yang untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Susanto, 2019). Dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Aktivitas=
$$\frac{Belanja\ Operasional}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

d. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total pendapatan APBD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan besarnya pendapatan transfer dibandingkan dengan pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan

keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam (Marlianita & Saleh, 2020). Dengan Rumus sebagai berikut:

e. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah mengindikasikan besarnya alokasi Belanja Daerah untuk Belanja Modal. Semakin tinggi rasio ini dapat dikatakan keserasian belanja daerah semakin tinggi karena semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar proporsi alokasi Belanja Daerah ke Belanja Modal, demikian sebaliknya, semakin rendah rasio ini berarti semakin rendah keserasian belanja daerah karena semakin kecil rasio ini berarti proporsi alokasi Belanja Daerah ke Belanja Modal semakin kecil. Ada dua rumus keserasian belanja daerah yaitu belanja operasional dan rasio belanja modal (Saputra et al., 2018). Dengan Rumus sebagai berikut:

Rasio belanja operasional =
$$\frac{Total\ belanja\ operasional}{Total\ belanja\ daerah} \times 100\%$$

Rasio belanja modal =
$$\frac{Total\ belanja\ modal}{Total\ belanja\ daerah} \times 100\%$$

f. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. (Kusuma & Rachmawati 2019). Dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Realisasi\ Pendapaan}{Anggaran\ Pendapatan} X\ 100\%$$

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

g. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan yaitu mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diproritaskan untuk mendapatkan perhatian. (Susanto, 2019). Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

 $Rasio \ Pertumbuhan \ Pendapatan \\ Rumus = \frac{Realisasi \ Pendapatan \ Xn-Realisasi \ Pendapatan Xn-1}{Realisasi \ Pendapatan \ Xn-1} X \ 100\%$ $Rasio \ Pertumbuhan \ Belanja \\ Rumus = \frac{Realisasi \ Belanja \ Xn-Realisasi \ Belanja \ Xn-1}{Realisasi \ Belanja \ Xn-1} X \ 100\%$

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya digunkan untuk membandingkan data-data penelitian, peneliti memulai tinjauan pustaka dengan melihat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan melakukan penelitian ini, mendapatkan rujukan sebagai pendukung, pelengkap, dan pembanding yang relevan untuk melakukan penelitian yang lebih memadai, yang menjadi referensi penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rasta	Kinerja	Variabel	Penelitian ini bertujuan untuk
	Seviafani	Keuangan	Penelitian:	mengevaluasi kinerja
	Hidayati,	Pengelolaan	Kinerja	keuangan pengelolaan
	Norita	Alokasi	keuangan,	Alokasi Dana Desa (ADD) di
	Citra	Dana Desa	Rasio	Desa Klungkung, Kecamatan

∪niversitas Islam Indragiri



peraturan yang berlaku di Indonesia

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengar

Peneliti Judul Variabel **Hasil Penelitian** No Yuliarti, Berdasarkan efektivitas, Sukorambi, Kabupaten Jember, selama periode 2018 Moh. Rasio Rasio Halim Efektivitas, efisiensi dan hingga 2022. Evaluasi (2023)Rasio Rasio dilakukan dengan Efesiensi pertumbuhan menggunakan tiga indikator Dan Rasio rasio keuangan, yaitu rasio Pertumbuha Alat Analisis efektivitas. efisiensi. dan :RasioKeuan pertumbuhan. Hasil n penelitian menunjukkan gan menganalisis bahwa kinerja pengelolaan ADD dari segi efektivitas data kuantitatif tergolong baik, dengan dari Laporan sebagian besar tahun berada Realisasi dalam kategori efektif. **APBDes** kecuali tahun 2018 yang efektivitas Desa menunjukkan rendah. Dari sisi efisiensi, Klungkung tahun 2018pengelolaan anggaran belanja 2022 juga menunjukkan kinerja secara deskriptif yang baik dengan rasio efisiensi pada sebagian besar tahun mencapai angka 100% atau efisien berimbang. Namun. dari sisi pertumbuhan baik pendapatan maupun belanja, kinerja keuangan desa masih tergolong rendah fluktuatif. Pertumbuhan yang signifikan hanya terjadi pada tahun 2019, sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan pertumbuhan yang negatif atau rendah. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan keuangan ADD di Desa Klungkung sudah efektif dan efisien, namun perlu ditingkatkan dari sisi pertumbuhan agar pengelolaan keuangan lebih berkelanjutan di masa mendatang Analisis Variabel Penelitian ini bertujuan untuk Erviana Putri, Raju Kinerja penelitian: menganalisis kinerja

Universitas Islam Indragiri



peraturan yang berlaku di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi Penggunaan untuk kepentingan akademik

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengar

Hasil Penelitian No Peneliti Judul Variabel Maulana, Keuangan Kinerja keuangan pengelolaan Pengelolaan Edi Alokasi Dana Desa (ADD) di Keuangan, Alokasi Susanto Rasio Desa Sungai Baru. (2024)liDana Desa Efektivitas, Kecamatan Gaung, Berdasarkan Rasio Kabupaten Indragiri Hilir Rasio Pertumbuhan. selama tahun 2018–2022, Efektivitas dengan menggunakan dua Rasio Alat analisis: indikator utama yaitu rasio Dan Pertumbuha pendekatan efektivitas dan rasio n Pada Desa deskriptif pertumbuhan. Hasil menunjukkan Sungai Baru kualitatif, penelitian Kecamatan dengan alat bahwa kinerja keuangan dari Gaung analisis efektivitas tergolong segi Kabupaten berupa sangat baik karena seluruh Indragiri perhitungan tahun dalam periode Hilir penelitian mencapai angka rasio 100%, yang berarti realisasi anggaran ADD selalu sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Namun, dari sisi pertumbuhan, baik pendapatan maupun belanja menunjukkan hasil yang rendah, dengan persentase pertumbuhan di bawah 25% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mampu merealisasikan anggaran dengan kemampuan baik, dalam meningkatkan pendapatan dan belanja secara berkelanjutan masih terbatas. Oleh karena itu, desa perlu meningkatkan strategi pengelolaan perencanaan keuangan agar dapat mendorong pertumbuhan yang lebih optimal di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk 3. Iin Ivanda **Analisis** Variabel Listari. Rasio Penelitian menganalisis kinerja Kukuh Efektivitas, Rasio keuangan pengelolaan Harianto, efektivitas, Alokasi Dana Desa (ADD) di Rasio Trisnia Efisiensi, rasio Desa Karangdagangan,



peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Universitas Islam Indragiri

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Widuri	Dan Rasio	efesiensi dan	Kabupaten Jombang, selama
	(2022)	Kemandiria	Rasio	periode 2018–2021, dengan
		n Dalam	kemandirian	menggunakan tiga indikator,
		Pengelolaan		yaitu rasio efektivitas, rasio
		Keuangan		efisiensi, dan rasio
		Alokasi	Alat Analisis	kemandirian. Hasil penelitian
		Dana Desa	: Deskriptif	menunjukkan bahwa dari
		(2018-2021)		segi efektivitas, pengelolaan
				ADD tergolong sangat baik
				karena realisasi anggaran
				selalu mencapai 100% setiap
			.01	tahun. Namun, dari sisi
		/ C	15LA	efisiensi, kinerja dinilai
		100		kurang efisien dengan ratarata persentase di atas 95%,
			10.31.	menunjukkan bahwa
		19/3	(50-00-1)	penggunaan anggaran belum
		10-1-X	8	optimal. Sementara itu, rasio
	/	41/19	V	kemandirian desa tergolong
		7	2 m 2	tinggi, dengan persentase di
			∕ ○ △ △ △ △ △ △ △ 	atas 97% setiap tahun, yang
				mengindikasikan bahwa desa
				mampu mengelola dana
				secara mandiri tanpa
		X		ketergantungan pada bantuan
	\			pemerintah pusat. Secara
	\			keseluruhan, kinerja
	\			keuangan Desa
			JNISI/	Karangdagangan cukup baik
				dari segi efektivitas dan
		4	1-1/0	kemandirian, namun masih
			ARYE	perlu peningkatan dalam hal
				efisiensi penggunaan
4	Doni	Amaliaia	Variabal	anggaran.
4.	Rani	Analisis	Variabel Penelitian :	Bahwa kinerja keuangan
	Anjeli (2024)	Kinerja Keuangan	alokasi dana	pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor desa
	(2024)	Pengelolaan	desa. Rasio	tanjung kabupaten kampar
		Alokasi	efektivitas,	dari tahun 2018-2021 sudah
		Dana Desa	rasio	baik. Hal ini dapat dilihat
		Berdasarkan	Pertumbuhan	dari hasil perhitungan rasio
		Rasio		efektivitas dan rasio
		Efektivitas		petumbuhan sebagai berikut :
		Dan Rasio	Alat Analisis	Rasio Efektivitas pada kantor
		Pertumbuha	: Deskriptif	desa tanjung kabupaten
<u> </u>	l	1	1	



peraturan yang berlaku di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Universitas Islam Indragiri

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia Penggunaan untuk kepentingan akademik

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengar

Peneliti Judul Variabel **Hasil Penelitian** No kampar pada tahun 2018n Pada Kantor 2021 menunjukkan kinerja Desa keuangan kantor desa Tanjung didapati hasil yang baik Kabupaten karena presentase hasil Kampar perhitungan rasio pada empat periode laporan tahun keuangannya efektif. Karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 99,88%. 2. Rasio Pertumbuhan pada kantor desa tanjung kabuapaten kampar dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu 39,28% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu -1,58%. 5. **Analisis** Variabel Kajian tersebut menganalisis Agung Prasetyo efisiensi. Realisasi Penelitian efektivitas. Pendapatan alokasi dana tingkat kegagalan Pendapatan Amu, Niswatin, Asli Daerah desa. Rasio Asli Daerah (PAD) **Nilawaty** dengan efektivitas, Kabupaten Gorontalo Yusuf sebelum Menggunak rasio dan sesudah (2023)Efesiensi dan COVID-19. Rasio pandemi Efektivitas, Rasio Hasilnya menunjukkan Rasio Pertumbuhan bahwa efektivitas **PAD** Efisiensi peningkatan, mengalami dan Rasio dengan tingkat efisiensi Alat Analisis 82% Pertumbuha sebesar pada tahun n di Badan : Deskriptif 2013-2018 tingkat dan Keuangan efisiensi sebesar 100% pada Kota 2019-2021. Jumlah tahun Gorontalo. pegawai pada tahun 2013 hingga tahun 2021 juga mengalami peningkatan pertumbuhan dengan laju sebesar 16%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak dapat secara efektif memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk perencanaan dan

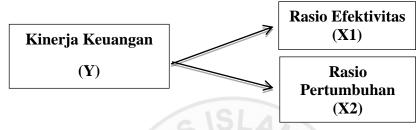


Penggunaan untuk

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				pembangunan.

C. KERANGKA BERPIKIR

Untuk memperjelas konsep dan arahan penelitian, maka penelitian membuat kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data Olahan 2025

D. HIPOTESIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

.. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis disebut sebagai hasil sementara dalam penelitian karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dari fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban teoris terhadap rumusan masalah penelitian daripada sebagai jawaban empiris (Priadana & Sunarsi 2021).

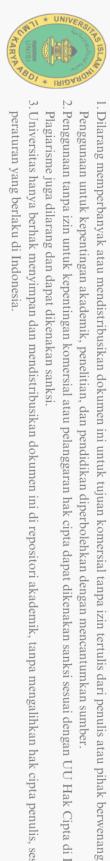
Hipotesis dalam penelitian ini adalah

- a. Diduga kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa
 Pekan Kamis jika diukur menggunakan rasio efektivitas berada pada kondisi
 sangat efektif
- b. Diduga kinerja keungan pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Pekan Kamis jika diukur mengggunakan rasio pertumbuhan berada pada kondisi baik.

E. VARIABEL PENELITIAN

Universitas Islam Indragiri

penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Konsep Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjadi dasar dalam mengembangkan instrumen penelitian, yaitu alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini dalam Zubair (2020). definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1) Rasio Keuangan (Variabel bebas / X)

Rasio keuangan adalah teknik yang melibatkan perbandingan angkaangka dalam laporan keuangan. Perbandingan ini bisa mencakup elemenelemen dalam laporan keuangan yang sama atau antara laporan keuangan dan elemen lain dalam laporan yang sama. Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data berbasis angka dalam neraca atau laporan pendapatan suatu organisasi. Rasio keuangan mengacu pada angka-angka yang muncul setelah membandingkan akun dalam laporan keuangan dengan akun lain yang dianggap signifikan dan material (Hidayati et al., 2023).

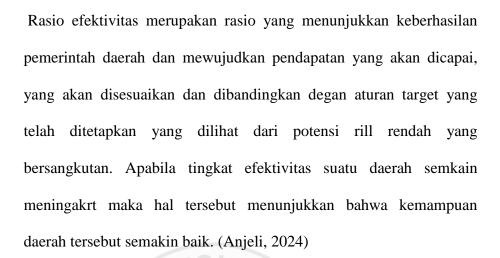
a) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas diartikan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran



- 1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Mahmudi menjelaskan bahwa efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transpormasi Pelayanan Publik "Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang didak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya (dalam anjeli 2024). Rasio efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Abu Bakar, (dalam Hidayati et al., 2023) Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan yang telah direncanakan jika dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas adalah ukuran yang menilai sejauh mana hasil dari suatu kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dari berbagai definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dalam perbandingan dengan anggaran yang telah ditetapkan (dalam Hidayati et al., 2023).



Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam tertentu jumlah yang ditetapkan sebelumnya untukmenghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya maka Efektifitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. (dalam Amu et al., 2023)



l. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

Pengukuran efektifitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%. Namun, demikian semakin tinggi ratio efektifitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik. Pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektifitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektifitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target target pendapatan sektor publik. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja. (Amu et al., 2023)

Menurut Kusuma dan Rachmawati (2019) Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Pengukurannya menggunakan rumus:

setelah melaui proses perhitungan maka kriteria yang diperoleh akan dicocokan dengan persentase agar digolongkan termasuk dalam kategori efektif/tidak. Kriteria penilaian/persentase menurut Mahmudi (dalam Hidayanti et al., 2023) yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No.	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektifitas
1.	Diatas 100%	Sangat Efektif
2.	90%-100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019) (dalam Hidayanti et al., 2023)

Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan jika persentase atau nilai yang didapatkan dari memperhitungkan rasio efektivitas dapat dijelaskan yaitu:

- 1) Diperoleh nilai atau persentase x >100% maka kinerja digolongkan sangat efektif.
- 2) Diperoleh nilai atau persentase 90% 100% maka kinerja digolongkan efektif.

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang



- 3) Diperoleh nilai atau persentase 80% 90% maka kinerja digolongkan cukup efektif.
- 4) Diperoleh nilai atau persentase 60% 80% maka kinerja digolongkan kurang efektif.
- 5) Diperoleh nilai atau perse ntase kurang dari 60% (x < 60%) maka kinerja digolongkan tidak efektif.

b) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan yang juga disebut (Growth Ratio), adalah indikator yang mencerminkan kemampuan sebuah entitas atau perusahaan untuk ekonominya mempertahankan stabilitas dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya Saladin & Oktariansyah (dalam Hidayanti et al., 2023) Rasio pertumbuhan berguna untuk mengidentifikasi pertumbuhan individu dalam setiap komponen Menurut Arief Sugiono (Amu et al., 2023) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya. Selanjutnya, Irham Fahmi (dalam Amu et al., 2023) menjelaskan dalam bukunya mendefiniskan rasio pertumbuhan sebagai berikut: "Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum."

Rasio pertumbuhan salah satu rasio untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam satu atau beberapa periode



peraturan yang berlaku di Indonesia

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber

anggaran yang berlangsung, apakah daerah tersebut berhasil atau tidak menumbuhkan pendapatan atau belanja daerah secara positif ataupun sebaliknya. Rasio pertumbuhan pada dasarnya mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan kinerja yang dicapai dalam kurun satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Anjeli, 2024).

Menurut Welio Wonda (Eva, 2019) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Dari penjelasan di atas maka dapat di gunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Realisasi Pendapatan Xn–Realisasi PendapatanXn–1

X 100% Realisasi Pendapatan Xn-1

Rasio Pertumbuhan Belanja

Realisasi Belanja Xn–Realisasi Belanja Xn–1 Realisasi Belanja Xn-1

xn = 1 anun yang dihitung

Xn-1= Tahun sebelumnya

Setelah melalui proses perhitungan maka kriteria yang diperoleh akan dicocokan dengan persentase agar dapat digolongkan. Menurut Mahmudi dalam Hidayanti et al., (2023) kriteria penilaian persentase yaitu sebagai berikut:

Jniversitas Islam Indragiri

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan

No	Tingkat Pertumbuhan	Kriteria
1.	0% - 10%	Sangat Rendah
2.	11% - 20%	Rendah
3.	21% – 30%	Sedang
4.	> 40%	Tinggi

Sumber: (Anugeraheni & Yuniari, 2022)

Tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan jika persentase atau nilai yang diperoleh dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Diperoleh nilai atau persentase < 0% 10% maka digolongkan pertumbuhannya sangat rendah
- 2. Diperoleh nilai atau persentase 11% 20% maka digolongkan pertumbuhannya rendah.
- 3. Diperoleh nilai atau persentase 21% 30% maka digolongkan pertumbuhannya sedang.
- 4. Diperoleh nilai atau persentase 40% maka digolongkan pertumbuhannya tinggi.
- 2) Kinerja Keuangan (variabel terikat / Y)

Analisis kinerja keuangan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menghitung, mendeskripsikan, serta mengevaluasi hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam periode tertentu. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan pertumbuhan pengelolaan keuangan, serta



memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan di masa yang akan datang.



Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi

peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

Universitas Islam Indragiri



BAB III

METODE PENELITIAN

A. OBJEK DAN WAKTU PENELITIAN

1. Obejek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diambil dari laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Waktu Penelitian

Dalam perencanaan penulisan ini, waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2024 sampai bulan April 2025

B. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data Kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif merupakan data yang dominan oleh angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data laporan keuangan APBDES Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri hilir dan data kualitatif adalah data yang merujuk pada objek penelitian yaitu data berupa non angka. Data kualitatif dalam perusahaan biasanya berupa sejarah singkat, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data kualitatif adalah sejarah singkat, dan gambaran umum desa.

. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia

∪niversitas Islam Indragiri